

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI

 [gorontalo.kpu.go.id](http://gorontalo.kpu.go.id)

 [kpuprovgtlo](https://www.instagram.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.facebook.com/KPUProvinsiGorontalo)

 [@kpuprovgtlo](https://twitter.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.youtube.com/KPUProvinsiGorontalo)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

# TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen Sekretaris beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan Kami, Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2021 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo di masa akan datang.

Gorontalo, 24 Januari 2022  
SEKRETARIS  
  
MUKTI ABDULLATIF MILE

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
A.    LATAR BELAKANG .....	3
B.    KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	5
1.    Kedudukan .....	5
2.    Tugas Sekretariat KPU Provinsi:.....	6
3.    Wewenang Sekretariat KPU Provinsi: .....	7
4.    Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi: .....	7
C.    STRUKTUR ORGANISASI .....	7
1.    Struktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo .....	7
2.    Sumber Daya Manusia .....	8
D.    SISTEMATIKA .....	10
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
A.    RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2020 - 2024 ....	12
1.    Visi.....	12
2.    Misi .....	12
3.    Tujuan KPU Provinsi Gorontalo .....	13
4.    Indikator Kinerja Utama .....	13
5.    Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo .....	14
B.    RENCANA KINERJA TAHUN 2021 .....	15
C.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	18
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A.    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	23
B.    EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	25
C.    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	45
BAB IV .....	50
P E N U T U P .....	50

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor: 07 Tahun 2017 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu secara nasional dan lokal.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun baik internal maupun eksternal organisasi, yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan

kinerja. Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah.

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan Demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak - hak konstitusi warga negara.

KPU secara hierarki berpedoman pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka



Menengah Nasional yang pada operasional kerjanya yang dituangkan dalam Rencana Strategi KPU 2020-2024, Renstra KPU ini menjadi acuan dan panduan utama bagi perencanaan strategi (Renstra) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU Provinsi Gorontalo setiap tahunnya melakukan perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing masing satuan kerja Kabupaten/Kota. Perencanaan anggaran berpedoman

pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada Tahun Anggaran 2021 KPU Provinsi Gorontalo mempunyai 2 (dua) Program yang harus dicapai yaitu Program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. 2 (dua) Program ini, terstruktur dalam 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Provinsi Gorontalo dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi. KPU Provinsi bersifat tetap, mandiri dan hierarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum sebagaimana pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU secara berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 diatur secara jelas tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

## **2. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:**

- a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberi dukungan teknis administratif;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:**

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara Pemilu berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:**

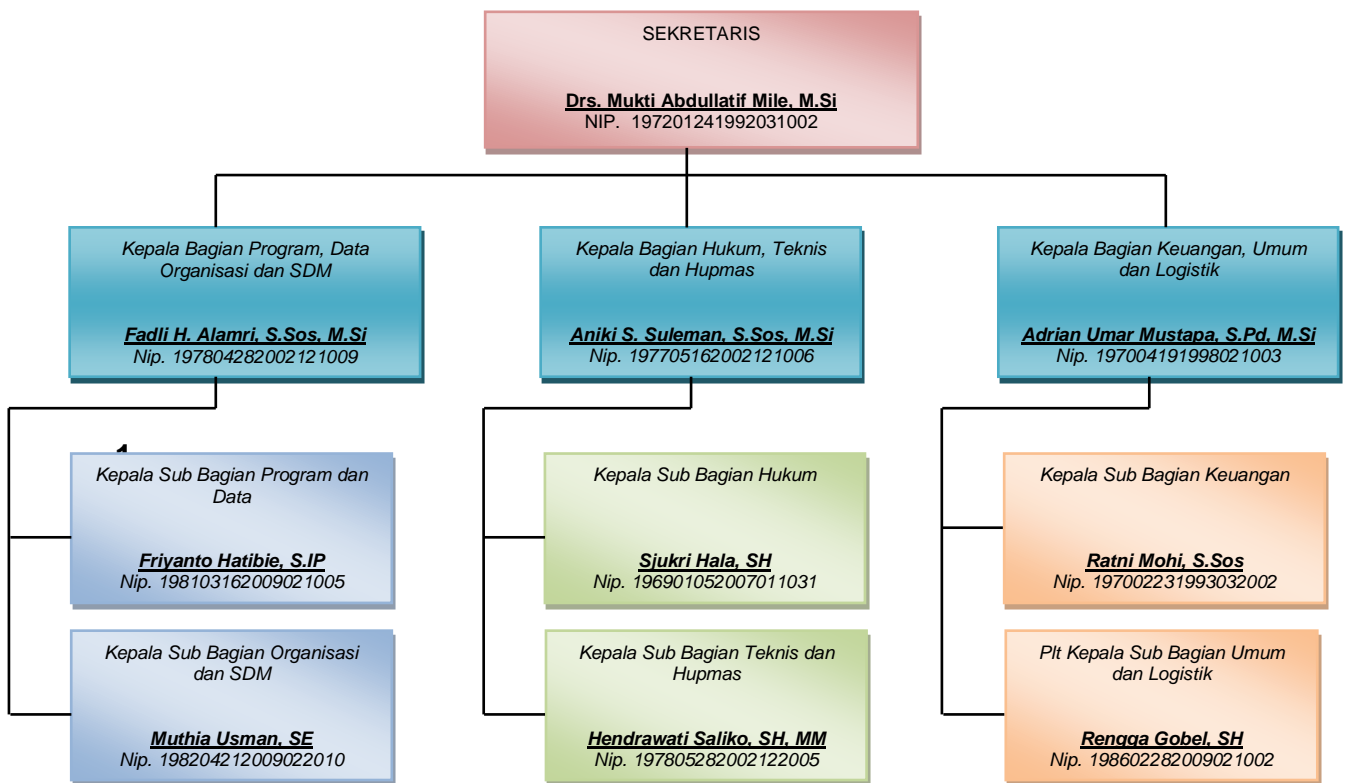
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen KPU Provinsi;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo**

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**Grafik 1.1 STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## 2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas kepemiluan dan kedinasan.

Peningkatan Sumber daya manusia di Tahun 2021 dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan

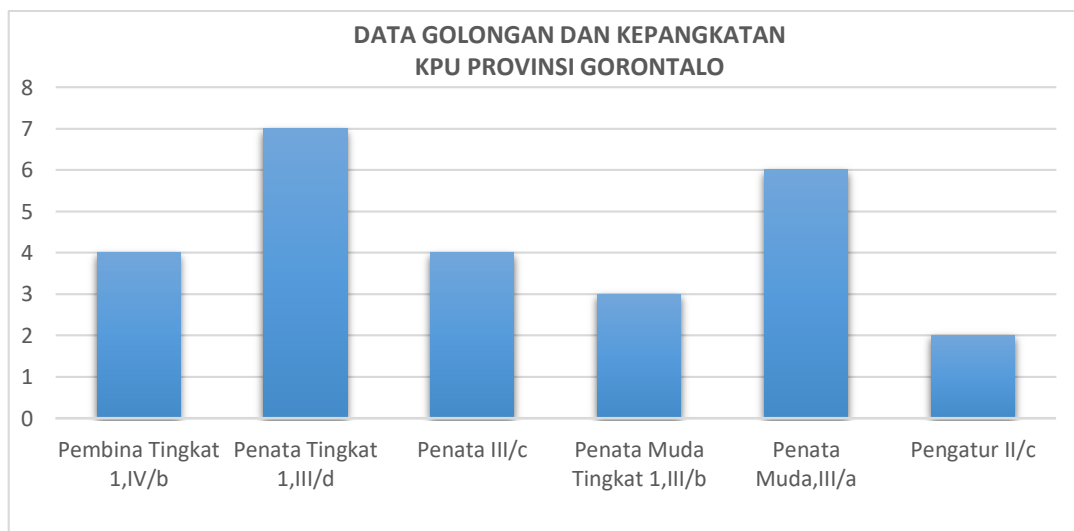


bimbingan teknis dalam pengembangan SDM yang akan menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Di sisi lain, telah dilaksanakan alih status dari instansi induk menjadi organik KPU dan beberapa dimutasikan kembali ke instansi induk (Pemerintah daerah).



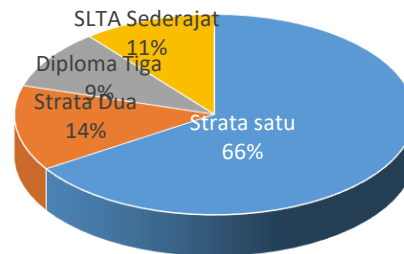
Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Grafik 1.2**  
**Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo**



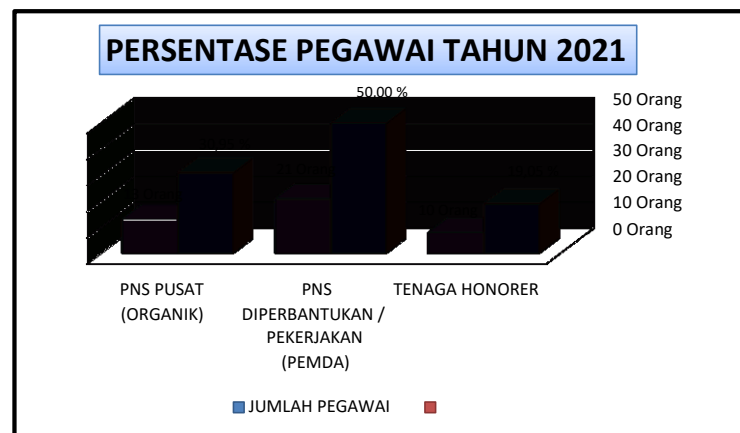
Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat Kpu provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini

Grafik 1.3 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2021



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah melakukan alih status terhitung sejak Agustus 2021 serta pegawai honorer/outsorcing. Adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini;

Grafik 1.4  
Persentase Pegawai Tahun 2021



#### D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

##### KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dan visi misi KPU.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2020 - 2024

KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU-PROV-027/TAHUN 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020 – 2024.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

##### 1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2020-2024 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel.

##### 2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk

mewujudkan Visi KPU Provinsi Gorontalo Periode 2020 – 2024. Misi ini, melaksanakan mis Pemerintah Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **4. Indikator Kinerja Utama**

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh

Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU-Prov-027/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
5. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
6. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
7. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
8. Nilai akuntabilitas kinerja;
9. Opini BPK atas laporan keuangan;
10. Indeks reformasi birokrasi;
11. Nilai keterbukaan informasi public.

Untuk menjabarkan IKU KPU Provinsi Gorontalo dicapai melalui sasaran strategis berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo.

## **5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

Seiring dengan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas, yaitu

- Tersedianya peraturan perundang–undangan di bidang politik yang kuat;
  - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
- Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
  - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistematika dan sinkron dengan Rencana Kerja Tahunan KPU RI Tahun 2021. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2021 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
6	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai	Jumlah Lapiran barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%

	dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Laporan
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
10	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

13	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%
----	--	---	------

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021, sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
6	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Lapiran barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
10	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
13	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%

Bahwa dalam perjanjian kinerja telah dilakukan perubahan karena penambahan anggaran sebagaimana dalam matriks dibawah ini:

Tabel 2.3

## Revisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	5.744.520.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2021
2	DIPA REVISI 1	5.744.520.000	5.744.520.000	-	
3	DIPA REVISI 2	5.744.520.000	5.885.852.000	141.332.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
4	DIPA REVISI 3	5.885.852.000	5.962.230.000	76.378.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
5	DIPA REVISI 4	5.962.230.000	5.529.533.000	432.697.000	Kekurangan Anggaran, Revisi Eselon I
6	DIPA REVISI 5	5.529.533.000	5.529.533.000	-	
7	DIPA REVISI 6	5.529.533.000	5.652.393.000	122.860.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
8	DIPA REVISI 7	5.652.393.000	5.917.721.000	265.328.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
9	DIPA REVISI 8	5.917.721.000	5.917.721.000	-	
10	DIPA REVISI 9	5.917.721.000	5.889.232.000	28.489.000	Kekurangan Anggaran, Revisi Eselon I
11	DIPA REVISI 10	5.889.232.000	6.221.922.000	332.690.000	Ketambahan Anggaran, Dana Hibah
12	DIPA REVISI 11	6.221.922.000	6.282.492.000	60.570.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
13	DIPA REVISI 12	6.282.492.000	6.441.775.000	159.283.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4		
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	13 Kali	162.5
2	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100
3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100
4	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan tepat waktu	100%	100%	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4		
5	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	100%	100
6	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%	100
7	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	100%	100
8	Jumlah Lapidan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%	100%	100
9	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Laporan	5 Laporan	100
10	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	100%	100
11	Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100
12	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4		
13	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100
14	Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100
15	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	100%	100
16	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	100%	100
17	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100
18	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%	100%	100

Dari tabel diatas terdapat Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang akan diurai dalam Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**SASARAN 1****TERWUJUDNYA RENCANA KERJA ANGGARAN KPU PROVINSI DAN KPU  
KABUPATEN/KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan

Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan penyusunan rencana kerja di awal tahun Anggaran 2021. Adapun pelaksanaan revisi dilakukan menyesuaikan ketambahan dan pengurangan dari Eselon I, dan hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan atau revisi terhadap rencana kerja yang telah disusun di awal tahun.



Selama Tahun Anggaran 2021 Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melakukan revisi terhadap rencana



kerja sebanyak 13 (tiga belas) kali hingga Desember 2021. Hal ini disebabkan adanya kekurangan anggaran pada Bulan

November 2021, dalam hal proses refocusing yang dilaksanakan oleh KPU RI, dan adanya ketambahan di bulan Desember untuk kebutuhan belanja gaji dan honorarium yang menyebabkan revisi masih dilakukan di akhir tahun.

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Revisi Anggaran KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target	Realisasi	
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	8	8	13	162,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan revisi anggaran di KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2021 melebihi target yang semestinya dibawah 8 kali dalam hal mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien.

**SASARAN 2**

**TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN  
PEMILU YANG TERTIB, EFEKTIF, DAN EFISIEN**

Berdasarkan sasaran kinerja terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien terdapat 3 indikator kinerja, yaitu:

**1. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh melaksanakan rencana kerja yang telah disusun di awal tahun agar terlaksana sesuai target.

LAPORAN REALISASI NASIONAL PER WILAYAH BERDASARKAN OMSPAN (SP2D) 2021  
PER-TANGGAL 21 DESEMBER 2021

No	Wilayah	Rencana		%	Sisa
		PKD	Realisasi		
1	PROV. GORONTALO	11.104.891.000	11.104.891.700	100,0%	0,000.000
2	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
3	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
4	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
5	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
6	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
7	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
8	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
9	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
10	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
11	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
12	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
13	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
14	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
15	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
16	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
17	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
18	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
19	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
20	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
21	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
22	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
23	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
24	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
25	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
26	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
27	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
28	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
29	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
30	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
31	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
32	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
33	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
34	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
35	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
36	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
37	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
38	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
39	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
40	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
41	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
42	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
43	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
44	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
45	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
46	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
47	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
48	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
49	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
50	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
51	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
52	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
53	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
54	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
55	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
56	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
57	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
58	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
59	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
60	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
61	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
62	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
63	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
64	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
65	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
66	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
67	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
68	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
69	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
70	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
71	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
72	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
73	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
74	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
75	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
76	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
77	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
78	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
79	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
80	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
81	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
82	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
83	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
84	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
85	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
86	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
87	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
88	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
89	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
90	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
91	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
92	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
93	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
94	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
95	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
96	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
97	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
98	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
99	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
100	PROV. GORONTALO	10.700.000.000	10.700.000.000	100,0%	0,000.000
TOTAL	1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000	100,0%	0,000.000

Berdasarkan Laporan Realisasi Nasional perwilayah sesuai OMSPAN (SP2D) Tahun Anggaran 2021, KPU Provinsi Gorontalo berada di posisi 7 (tujuh). Hal ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Gorontalo termasuk satuan kerja yang baik dalam pencapaian target kinerja.

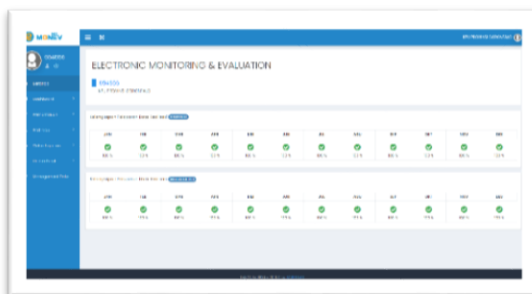
## 2. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu

Dalam indikator kinerja ini, Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh Tim dari KPU RI pada 24 Oktober 2021.



Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, KPU Provinsi Gorontalo merupakan salah dari 16 Provinsi yang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Selain itu, Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo juga

secara tepat waktu melaporkan penggunaan anggaran diakhir bulan berjalan pada aplikasi e-monev sesuai dengan petunjuk.

## 3. Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu



Dalam indikator kinerja ini, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memfokuskan kegiatan pada pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan pelaksanaan lelang barang sesuai dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berlaku.

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Administrasi Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi  
Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100	100	100	100
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	100
Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo.

**SASARAN 3**

**MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Persentase Penegakan Disiplin Pegawai

Dalam pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memiliki indikator kinerja persentase penegakan disiplin pegawai yang direalisasikan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

**1. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM**

Dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan beberapa kegiatan selama Tahun 2021 seperti:

- Penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;

- Penyusunan nominatif pegawai;
- Pelaksanaan apel dalam rangka Ulang Tahun KORPRI ke 50 Tahun;
- Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo;
- Ujian Alih Status;
- Peremajaan Data Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi My SAPK.



## 2. Dokumen Kepegawaian



Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan ketatalaksanaan sumber daya manusia dengan mengirimkan peserta bimbingan dan teknologi dalam rangka pengelolaan kepegawaian.

**Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Realisasi Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	100	100	100	100
Dokumen Kepegawaian	100	100	100	100

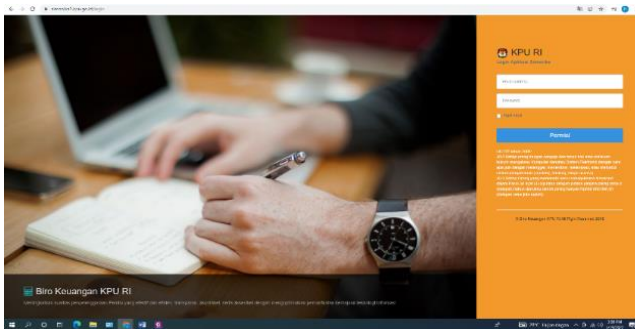
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo.

**SASARAN 4**

**TERSUSUNNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN ANGGARAN**

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan secara online melalui aplikasi SIMONIKA (sistem informasi monitoring keuangan) dimana dilakukan setiap bulan berjalan.



Adapun hasil input dapat dilihat pada gambar berikut;

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Penyampaian Laporan berbasis SIMONIKA  
KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100	95	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyampaian laporan penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA di KPU Provinsi Gorontalo melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo. Hal ini

dikarenakan operator aplikasi SIMONIKA yang melakukan input dengan tepat waktu dan tepat.

**SASARAN 5**

**TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN**

Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang Dapat Diselesaikan

Sasaran kinerja terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan, diukur berdasarkan indikator kinerja persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester awal dan evaluasi dilakukan pada akhir bulan oleh sub bagian keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Penyelesaian Permasalahan dan Pengelolaan  
Keuangan KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang Dapat Diselesaikan	100	80	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan di KPU Provinsi Gorontalo melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo dan merupakan capaian yang sangat baik.



**Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Pengelolaan BMN KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100	5 Laporan	5 Laporan	100
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	100	98	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengelolaan barang milik negara di KPU Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan target yang diharapkan berdasarkan apa yang telah disusun dalam Renstra 2020 – 2024.

**SASARAN 7**

**MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA ADMINISTRASI  
PERSURATAN DAN PENGELOLAAN ARSIP**

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan

Sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip diwujudkan dengan pelaksanaan indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan. Dalam hal ini sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melakukan monitoring pada sub bagian umum dan logistik agar melakukan penataan kearsipan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di KPU Provinsi Gorontalo. Selain itu, melakukan sosialisasi

mengenai PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut di KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Administrasi Persuratan dan  
Pengelolaan Kearsipan KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100	87.5	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan di KPU Provinsi Gorontalo melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo.

**SASARAN 8**

**TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA  
MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU PROVINSI GORONTALO**

Sasaran strategis terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana sedalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan sasaran kinerja terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Secara garis besar sarana dan prasarana tersedia dan berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari kartu inventaris ruangan yang dibuat setiap tahun.

### **1. Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik**

Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kantor untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik melalui beberapa aplikasi baik itu SIMAK BMN, SIMAN, dan aplikasi Persediaan yang memberikan informasi mengenai barang using/rusak yang belum dimusnahkan.

### **2. Persentase Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berfungsi dengan Baik**

Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo agak terhambat dalam pengelolaan Gedung KPU Provinsi Gorontalo hal ini dikarenakan terjadinya musibah kebakaran di sebagian gedung KPU Provinsi Gorontalo pada Bulan Agustus tahun 2021. Walau begitu pelaksanaan renovasi gedung pasca kebakaran telah selesai sehingga dapat dipergunakan sejak akhir tahun 2021.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100	100	100	100
Persentase Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berfungsi dengan baik	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo.

**SASARAN 9**

### **PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KPU**

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Sasaran kinerja peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan indikator kinerja persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Pada tahun 2021 Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo mengirimkan 5 (lima) Calon Pegawai

Negeri Sipil mengikuti pelatihan dasar (Latsar) pada awal Juni hingga awal Agustus di Badan Diklat Provinsi Gorontalo.



Selain itu Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo juga mengirimkan 2 (dua) staf pengamanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengamanan di Lido, Jawa Barat pada Oktober 2021.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Kompetensi SDM KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Gorontalo.

**SASARAN 10**

**TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
KPU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Persentase Rancangan Juknis KPU Provinsi Gorontalo yang Disusun dan Diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Sasaran terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan sesuai indikator persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan

diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melakukan kontrol terhadap sub bagian Hukum dalam merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan dan merancang peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada sebagai bentuk pelaksanaan indikator kinerja.

Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melalui sub bagian hukum melakukan pendampingan kepada KPU Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Gorontalo dalam menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.



Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Rancangan Peraturan KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Rancangan Juknis KPU Provinsi Gorontalo yang Disusun dan Diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran terwujudnya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – 2024.

**SASARAN 11****TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI HUKUM**

Berdasarkan sasaran kinerja terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

**1. Persentase Produk Hukum yang Dikelola dan Didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam melaksanakan indikator ini, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan optimalisasi dalam pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Sekretariat Jendral KPU RI, dan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Untuk pendokumentasian, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melalui Tim Pengelola Jaringan



Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan upload di laman JDIH KPU Provinsi Gorontalo secara terus menerus sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan sasaran kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo.

Pada tahun ini, Tim JDIH KPU Provinsi Gorontalo telah mengunggah lebih dari 437 dokumen pada laman JDIH.

**2. Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan secara Cepat, Tepat, dan Akurat sesuai dengan SOP**

Dalam hal ini, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melalui Tim JDIH melakukan penyajian mengenai informasi hukum secara cepat, tepat dan

akurat sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum KPU Provinsi  
Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100	92	100	100
Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100	90	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – 2024.

**SASARAN**      **12**

**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN DATA  
YANG CEPAT SERTA AKURAT**

Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti  
Melalui PPID sesuai dengan SOP

Dalam mewujudkan sasaran kinerja meningkatnya layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memiliki indikator kinerja persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui



PPID sesuai dengan SOP. Melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW.

Salah satu pelaksanaannya yaitu pengelolaan Desa Peduli Pemilu yang dihadiri oleh Deputi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja  
Realisasi Layanan Informasi dan data KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	92	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – 2024.

**SASARAN 13**

**TERSEDIANYA DATA, SARANA DAN PRASARANA  
TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PENERAPAN E-GOVERNMENT KPU**

Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap Pemilu/Pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu, digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik Pemilu/Pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara.

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersedianya data, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU adalah persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sesuai



amanat Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 17 huruf l disebutkan kewajiban KPU Provinsi melakukan Pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memutakhirkan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.7 Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Gorontalo	19	205	811	143.938	145.624	<b>289.562</b>
2	Kabupaten Boalemo	7	82	400	53.555	51.736	<b>105.291</b>
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	306	52.853	51.878	<b>104.731</b>
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	351	57.816	58.666	<b>116.482</b>

5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	400	43.063	42.285	85.348
6	Kota Gorontalo	9	50	544	63.707	67.975	131.682
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>729</b>	<b>2.812</b>	<b>414.932</b>	<b>418.164</b>	<b>933.096</b>

Data rekapitulasi tersebut diatas, diumumkan KPU Provinsi Gorontalo setiap bulan. Selain itu KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait setiap semester sebelum pengumuman hasil PDPB. Diakhir tahun 2021, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi PDPB yang diberi nama Lohumbuta yang diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Provinsi

Gorontalo secara umum, dan Pemilu tahun 2024 secara khusus.

Adapun perbandingan realisasi sasaran kegiatan ini dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Realisasi Layanan Informasi dan data KPU Provinsi Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020 (%)	2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100	92	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat KPU Provinsi Gorontalo sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – 2024.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2021 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran sebesar Rp. 6.441.775.000,- (Enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar

Rp. 66.867.020,- (Enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

Realisasi dari anggaran dalam DIPA APBN KPU Provinsi Gorontalo Nomor: SP DIPA-076.01.2.654556/2021

tanggal 05 Desember 2020 untuk anggaran APBN murni

mencapai 98,96 % sebagaimana tabel dibawah ini



**Tabel 2.20 Realisasi APBN Murni  
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021**

N O	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSE NTASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	5.744.520.000	6.441.775.000	6.374.907.980	66.867.020	98,96%	APBN MURNI tahun 2021

Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan.

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, serta didukung oleh stakeholder terkait di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.22 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran**

N O	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARG ET	REAL ISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SASARAN 1. Terwujudnya Rencan Kerja Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien</b>							
	Jumlah Revisi yang Dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	8 Kali	13 Kali	162,5	167.506.000	161.607.048	96
<b>SASARAN 2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien</b>							
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	99,8%	99,8	5.000.000	4.994.150	99,8
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	99,7%	99,7	97.567.000	97.247.511	99,7
	Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	99,2%	99,2	54.285.000	53.833.670	99,2
<b>Sasaran 3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>							

Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	97,9%	97,9	111.565.000	109.276.900	97,9
<b>Sasaran 4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran</b>						
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	93%	97,8	103.655.000	101.548.100	97,8
<b>Sasaran 5. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>						
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	78%	97,6	30.405.000	29.670.800	97,6
<b>SASARAN 6. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku</b>						
Jumlah Lapidan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%	98%	100	4.600.000	4.600.000	100
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Lapora n	6 Lapora n	120	24.106.000	24.083.200	99,9
<b>SASARAN 7. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</b>						
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	87,4%	99,9	54.430.000	54.390.376	99,9

<b>SASARAN 8. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo</b>							
Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	99,8%	99,8	1.176.734.000	1.175.081.326	99,8	
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98,7%	98,7	3.851.546.000	3.803.656.814	98,7	
<b>SASARAN 9. Peningkatan kompetensi SDM KPU</b>							
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	96,3%	96,3	92.094.000	88.667.199	93,3	
<b>SASARAN 10. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</b>							
Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	99,9%	99,9	27.462.000	27.446.600	99,9	
<b>SASARAN 11. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>							
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	91,9%	99,9	22.048.000	22.047.250	99,9	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	89,9%	99,9	65.226.000	65.180.671	99,9	
<b>SASARAN 12. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>							

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	99,9%	99,9	172.040.000	172.024.849	99,9
<b>SASARAN 13. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>						
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%	99,5%	99,5	381.506.000	379.734.686	99,5
<b>JUMLAH TOTAL</b>				6.441.775.000	6.375.090.950	98,96

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata kurang dari target anggaran, hal ini disebabkan oleh belanja bahan covid 19 yang tidak boleh dibelanjakan lagi, selain itu adanya penambahan anggaran dari APBN di akhir bulan Desember dan penyesuaian terhadap keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang lauk pauk yang bersifat fluktuatif berdasarkan kehadiran sehingga output belanja pegawai masih terdapat banyak sisa anggaran yang tidak dapat digunakan. Sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen.

## BAB IV P E N U T U P

Dalam mewujudkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistimatis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2021. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2021 yang direalisasinya dalam Program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran.

Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. Sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Sebagai bentuk kepatuhan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terhadap Pemerintah Republik Indonesia, seluruh elemen di KPU Provinsi Gorontalo ikut serta mensukseskan Program Vaksinasi.



Dimana Sekretaris, Pejabat Struktural dan seluruh staf KPU Provinsi Gorontalo telah divaksinasi.

## LAMPIRAN 1

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum**  
**Provinsi Gorontalo**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%

5	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
6	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Lapiran barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Laporan
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
10	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%

		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
13	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp.	5.529.533.000,-
2	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.	341.061.000,-

## Lampiran II

## Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2021

N O	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARG ET	REAL ISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SASARAN 1. Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien</b>							
	Jumlah Revisi yang Dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan	8 Kali	13 Kali	162,5	167.506.000	161.607.048	96
<b>SASARAN 2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien</b>							
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	99,8%	99,8	5.000.000	4.994.150	99,8
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	99,7%	99,7	97.567.000	97.247.511	99,7
	Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	99,2%	99,2	54.285.000	53.833.670	99,2
<b>Sasaran 3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>							
	Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	97,9%	97,9	111.565.000	109.276.900	97,9
<b>Sasaran 4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran</b>							
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	95%	93%	97,8	103.655.000	101.548.100	97,8

	Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid						
<b>Sasaran 5. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>							
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	78%	97,6	30.405.000	29.670.800	97,6
<b>SASARAN 6. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku</b>							
	Jumlah Lapiro barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	98%	98%	100	4.600.000	4.600.000	100
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material	5 Laporan	6 Laporan	120	24.106.000	24.083.200	99,9
<b>SASARAN 7. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</b>							
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%	87,4%	99,9	54.430.000	54.390.376	99,9
<b>SASARAN 8. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo</b>							
	Persentase gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	99,8%	99,8	1.176.734.000	1.175.081.326	99,8
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98,7%	98,7	3.851.546.000	3.803.656.814	98,7

<b>SASARAN 9. Peningkatan kompetensi SDM KPU</b>							
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	96,3%	96,3	92.094.000	88.667.199	93,3	
<b>SASARAN 10. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</b>							
Persentase rancangan juknis KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	99,9%	99,9	27.462.000	27.446.600	99,9	
<b>SASARAN 11. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>							
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	91,9%	99,9	22.048.000	22.047.250	99,9	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	89,9%	99,9	65.226.000	65.180.671	99,9	
<b>SASARAN 12. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>							
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	99,9%	99,9	172.040.000	172.024.849	99,9	
<b>SASARAN 13. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>							

Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%	99,5%	99,5	381.506.000	379.734.686	99,5
<b>JUMLAH TOTAL</b>				6.441.775.000	6.375.090.950	98,96

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp.	6.441.775.000,-
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.	341.061.000,-